

THE ROLE OF BMH IN ENHANCING ECONOMIC SELF-RELIANCE AMONG PERSONS WITH DISABILITIES IN LAWANG SUBDISTRICT, MALANG

Muhammad Khuzen¹, Ahmad Fathoni²
alkhuzain@gmail.com¹, tonydemak10@stail.ac.id²
Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al Hakim Surabaya

Abstrak

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial yang berdampak pada rendahnya kemandirian ekonomi. Keterbatasan sarana prasarana, kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif, serta stigma masyarakat memperkuat ketimpangan sosial. Di Kecamatan Lawang, pemberdayaan berbasis komunitas telah dilakukan, namun memerlukan dukungan berkelanjutan. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berperan dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan layanan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BMH dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BMH meningkatkan motivasi, keterampilan, dan partisipasi ekonomi penyandang disabilitas, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan modal, aksesibilitas, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Penyandang Disabilitas, BMH, Kemandirian Ekonomi.

Abstract

Persons with disabilities in Indonesia still face various barriers in accessing education, employment, and social services, which contribute to low levels of economic self-reliance. Limited infrastructure, policies that are not yet fully inclusive, and societal stigma further reinforce social inequality. In Lawang Subdistrict, community-based empowerment initiatives have been implemented, but they require sustained support. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) plays a role in empowering persons with disabilities economically through skills training programs, business mentoring, and social services. This study aims to analyze the role of BMH in enhancing the economic self-reliance of persons with disabilities and to identify supporting and inhibiting factors. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by triangulation. The findings indicate that BMH programs increase the motivation, skills, and economic participation of persons with disabilities, although challenges remain, including limited capital, accessibility constraints, and low community participation.

Keywords: Economic Empowerment, Persons With Disabilities, BMH, Economic Self-Reliance.

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial di Indonesia masih sangat kompleks, termasuk persoalan akses dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi stigma dan dianggap "tidak normal", padahal mereka hanya memiliki hambatan tertentu dalam aktivitas dan interaksi sosial. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Negara sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, namun

implementasinya masih belum optimal. Hambatan yang mereka hadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana, rendahnya penerimaan masyarakat, serta kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam perspektif Islam, semua manusia dipandang setara dan penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan manusiawi serta fasilitas yang sesuai dengan kondisi mereka. Ajaran Islam juga menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah kekurangan, melainkan bagian dari ujian yang dapat mengangkat derajat seseorang. Di sisi lain, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat. BMH di Kecamatan Lawang telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Linkarsosial dan Pemerintah Desa Bedali, melalui kegiatan Posyandu Disabilitas yang mencakup layanan kesehatan, aktivitas sosial, serta pelatihan wirausaha. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengkaji peran BMH dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang Malang.

Tujuan Penelitian ini, yang pertama adalah untuk menganalisis peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang, Malang. Kedua, untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BMH. Ketiga, untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi BMH dalam implementasi program peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Keempat, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas model pemberdayaan ekonomi yang diterapkan BMH.

Disabilitas dipahami sebagai kondisi yang menyebabkan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung dalam waktu lama dan dapat menghambat partisipasi penuh seseorang dalam kehidupan sosial. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, disabilitas bukan semata kekurangan individu, tetapi hasil interaksi antara keterbatasan dan lingkungan yang tidak ramah atau tidak aksesibel. Model sosial disabilitas menyatakan bahwa hambatan terbesar berasal dari konstruksi sosial, stigma, dan kurangnya fasilitas pendukung, bukan karena keterbatasan fisik atau psikologis individu itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan dan pengembangan lingkungan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas.

Kemandirian ekonomi mengacu pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Menurut Suparlan (2015), kemandirian ekonomi mencakup kemampuan mengelola sumber daya, keterampilan kerja, akses terhadap peluang ekonomi, dan kemampuan mengambil keputusan terkait usaha atau pekerjaan. Pada konteks penyandang disabilitas, kemandirian ekonomi dipandang sebagai capaian penting dalam mencapai keberfungsi sosial dan integrasi dalam masyarakat. Kemandirian tidak hanya mencakup pendapatan, tetapi juga rasa percaya diri, kemampuan berproduksi, daya tawar, serta partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan adalah proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar dapat mengambil keputusan, mengontrol sumber daya, serta meningkatkan kualitas hidup. Menurut teori pemberdayaan Rappaport (1987), pemberdayaan memiliki tiga dimensi utama:

Personal Empowerment – peningkatan kepercayaan diri dan kompetensi individu.

Interpersonal Empowerment – kemampuan membangun jaringan dan dukungan

sosial.

Social Political Empowerment – kemampuan mengakses lembaga, kebijakan, dan sumber daya ekonomi.

Dalam konteks disabilitas, pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penguatan kapasitas diri, serta akses terhadap modal dan peluang kerja. Lembaga seperti BMH memainkan peran penting dalam menginisiasi proses tersebut.

Teori peran menjelaskan bahwa setiap lembaga atau individu memiliki seperangkat harapan sosial yang membentuk perilaku mereka dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks penelitian ini, BMH sebagai lembaga amil zakat memiliki peran sosial-fungsional yang mencakup penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, termasuk penyandang disabilitas.

Peran lembaga dapat dikategorikan menjadi: Peran edukatif (memberikan pelatihan dan pengetahuan keterampilan), Peran fasilitatif (menyediakan sarana, modal, dan akses kegiatan ekonomi), Peran advokatif (memperjuangkan kepentingan mustahik serta membangun kemitraan dengan pemerintah dan komunitas), Peran motivatif (memberikan dukungan moral dan sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas).

Lembaga amil zakat berfungsi sebagai pengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat memiliki kewenangan melakukan program pemberdayaan ekonomi melalui distribusi dana produktif, pelatihan usaha, dan pembinaan intensif. BMH sebagai LAZNAS berfokus pada pemberdayaan mustahik melalui program pendidikan, ekonomi, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Dalam konteks disabilitas, pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat inklusif dan mandiri.

Ekonomi inklusif adalah pendekatan yang memastikan semua individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Prinsip ekonomi inklusif meliputi kesempatan kerja yang adil, akses terhadap pelatihan dan modal, lingkungan usaha yang mendukung dan kebijakan public yang adaptif. Dalam praktiknya, ekonomi inklusif memerlukan kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah, komunitas, dan sektor usaha. Program BMH di Kecamatan Lawang melalui Posyandu Disabilitas, pelatihan wirausaha, dan kegiatan pemberdayaan menjadi bagian dari implementasi ekonomi inklusif yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan daya saing penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang Malang.

Data primer berupa informasi terkait peran BMH dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, bentuk kegiatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, pengalaman para peserta program, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses peningkatan kemandirian ekonomi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung kegiatan, dan catatan lapangan.

Data sekunder berupa dokumen program, laporan tahunan, arsip kegiatan, profil lembaga, undang-undang tentang disabilitas, artikel jurnal, buku, dan literatur ilmiah lain yang relevan dengan tema pemberdayaan ekonomi dan penyandang disabilitas. Data sekunder membantu memperkuat dan melengkapi analisis data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif mengenai peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber dan teknik.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data, dengan bantuan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan catatan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian berakhir, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik validasi yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Member Check, dan Kecukupan Referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode penyaluran program ekonomi yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sejalan dengan prinsip-prinsip teori pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengontrol sumber daya serta mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini tercermin dari tahapan penyaluran program BMH yang tidak hanya berorientasi pada bantuan modal, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan penguatan jejaring sosial berbasis komunitas.

Dalam perspektif model sosial disabilitas, disabilitas tidak dipandang semata sebagai keterbatasan individu, melainkan sebagai akibat dari hambatan lingkungan, stigma sosial, dan minimnya akses terhadap fasilitas pendukung. Program ekonomi BMH yang dilaksanakan melalui pendekatan komunitas dan kolaborasi dengan pemerintah desa serta LINKSOS Lawang menunjukkan upaya mengurangi hambatan sosial tersebut. Pendampingan usaha dan integrasi layanan sosial seperti Posyandu Disabilitas berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam kegiatan ekonomi.

Metode penyaluran yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan mendukung peningkatan keberfungsian sosial penyandang disabilitas, sebagaimana dikemukakan dalam literatur kesejahteraan sosial bahwa kemandirian ekonomi tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kepercayaan diri, daya tawar, dan peran sosial individu dalam masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masih dibatasi oleh faktor struktural, seperti keterbatasan akses permodalan dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi penyandang

disabilitas memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada transformasi lingkungan sosial dan kebijakan pendukung.

Metode Penyaluran Program Ekonomi BMH terhadap Penyandang Disabilitas

Metode penyaluran program ekonomi yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan pendampingan berkelanjutan. Penyaluran program tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Tahap awal penyaluran diawali dengan identifikasi dan seleksi penerima manfaat melalui pendataan bersama mitra lokal, seperti komunitas Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) Lawang dan pemerintah desa. Seleksi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kondisi disabilitas, tingkat kerentanan ekonomi, serta potensi dan minat usaha yang dimiliki calon penerima manfaat.

Selanjutnya, BMH melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan ekonomi, yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan intelektual penyandang disabilitas. Pelatihan meliputi keterampilan usaha mikro, ekonomi kreatif, serta pengelolaan usaha sederhana. Setelah pelatihan, BMH menyalurkan bantuan modal dan sarana usaha produktif, baik dalam bentuk dana maupun peralatan penunjang usaha.

Tahap berikutnya adalah pendampingan usaha berbasis komunitas, di mana BMH bersama mitra lokal melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan usaha penerima manfaat. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas dalam menghadapi kendala usaha, meningkatkan manajemen usaha, serta menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Selain aspek ekonomi, BMH juga mengintegrasikan layanan sosial pendukung, seperti kegiatan Posyandu Disabilitas, sebagai upaya menjaga keberfungsi sosial dan kesehatan penerima manfaat. Dengan metode penyaluran yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan tersebut, program ekonomi BMH diharapkan mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas secara lebih optimal di tingkat lokal.

Kriteria Penerima Program Ekonomi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria penerima program ekonomi yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, disusun dengan mempertimbangkan aspek kerentanan ekonomi, potensi individu, serta prinsip pemberdayaan inklusif. Adapun kriteria penerima program ekonomi tersebut meliputi:

Status Disabilitas

Penerima merupakan penyandang disabilitas fisik dan/atau intelektual ringan yang memiliki kemampuan untuk mengikuti proses pelatihan dan pendampingan usaha. Penetapan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang menyesuaikan intervensi dengan kapasitas individu.

Kondisi Sosial Ekonomi

Penerima berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau mustahik yang mengalami keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan sumber penghidupan tetap. Kriteria ini mencerminkan orientasi program pada pengurangan kerentanan ekonomi.

Usia Produktif

Penerima berada pada usia produktif dan memiliki kesiapan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik secara individu maupun berbasis kelompok.

Motivasi dan Komitmen Berusaha

Penyandang disabilitas menunjukkan minat, motivasi, dan komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian program pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, dan evaluasi usaha. Aspek ini penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Potensi dan Minat Usaha

Penerima memiliki potensi keterampilan atau minat pada jenis usaha tertentu yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi disabilitas dan peluang ekonomi lokal.

Keterlibatan dalam Komunitas Binaan

Penerima tergabung dalam komunitas binaan atau mitra BMH, seperti Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) Lawang, guna memudahkan proses pendampingan, monitoring, dan penguatan jejaring sosial.

Dukungan Lingkungan Terdekat

Adanya dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar menjadi pertimbangan tambahan dalam menjaga keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat.

Dampak Program Ekonomi terhadap Penyandang Disabilitas

Secara ekonomi, program pemberdayaan berkontribusi pada meningkatnya keterampilan kerja dan kemampuan berusaha penyandang disabilitas. Melalui pelatihan dan pendampingan usaha, penerima manfaat mampu menjalankan usaha mikro secara lebih mandiri, sehingga memperoleh sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dibandingkan sebelum mengikuti program. Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi yang menekankan peningkatan kapasitas dan akses terhadap peluang ekonomi.

Pada aspek sosial, program ekonomi BMH mendorong meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi dan komunitas. Keterlibatan dalam kelompok usaha dan komunitas binaan memperluas jejaring sosial serta mengurangi isolasi sosial yang kerap dialami penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam model sosial disabilitas yang menekankan pentingnya lingkungan yang inklusif.

Selain itu, program ekonomi memberikan dampak psikologis berupa meningkatnya rasa percaya diri, motivasi, dan harga diri penerima manfaat. Penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang bergantung sepenuhnya pada bantuan, melainkan sebagai subjek yang produktif dan memiliki daya tawar ekonomi. Kondisi ini mendukung peningkatan keberfungsian sosial, di mana individu mampu menjalankan peran sosialnya secara lebih optimal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dampak program belum sepenuhnya merata. Beberapa penerima manfaat masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan modal lanjutan, akses pasar, dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya menerima keberadaan penyandang disabilitas sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dampak program ekonomi akan lebih optimal apabila disertai dengan penguatan kebijakan inklusif dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan.

BMH Malang menjalankan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan kegiatan Posyandu Disabilitas yang meliputi layanan kesehatan dan pembinaan sosial. Peran BMH terlihat dalam aspek edukatif, fasilitatif, advokatif, dan motivatif yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kemampuan, kepercayaan diri, dan partisipasi ekonomi penyandang disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian peserta mulai mampu memproduksi dan menjual hasil karya sehingga kemandirian ekonomi mereka mulai terbentuk. Meski demikian, pemberdayaan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal, aksesibilitas, dan pemasaran produk. Secara umum, program BMH memberi dampak positif namun memerlukan penguatan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian yang lebih optimal.

Tantangan dan Strategi Sosial

Tantangan Sosial

Temuan lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas adalah stigma sosial dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas sebagai pelaku usaha. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima manfaat:

“Awalnya masyarakat sekitar masih ragu, mereka menganggap saya tidak bisa bekerja mandiri karena kondisi saya. Jadi untuk memasarkan produk juga agak sulit.” (Informan 1, penerima manfaat)

Selain stigma, tantangan lain yang muncul adalah kurangnya dukungan sosial yang berkelanjutan, baik dari lingkungan sekitar maupun jejaring ekonomi. Seorang pendamping program menyampaikan:

“Kadang semangat mereka naik turun karena lingkungan belum sepenuhnya mendukung. Kalau tidak terus didampingi, usahanya bisa berhenti di tengah jalan.” (Informan 2, pendamping BMH)

Keterbatasan aksesibilitas sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan semata-mata berasal dari keterbatasan individu, melainkan dari lingkungan sosial yang belum inklusif, sebagaimana ditegaskan dalam model sosial disabilitas (Oliver, 1990).

Strategi Sosial

Dalam merespons tantangan tersebut, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menerapkan strategi sosial berbasis komunitas dan pendampingan partisipatif. Salah satu strategi utama adalah penguatan komunitas binaan, yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk saling mendukung dan belajar bersama. Hal ini diungkapkan oleh pengelola program:

“Kami tidak hanya memberi modal, tapi membentuk kelompok dan komunitas agar mereka merasa tidak sendirian dan bisa saling menguatkan.” (Informan 3, pengurus BMH)

BMH juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa dan komunitas lokal, seperti LINKSOS Lawang, untuk meningkatkan penerimaan sosial dan legitimasi program. Strategi ini dinilai efektif dalam mengurangi stigma, sebagaimana disampaikan oleh salah satu penerima manfaat:

“Setelah ada kegiatan bersama desa dan Posyandu Disabilitas, masyarakat mulai lebih menerima dan melihat kami bisa berusaha.” (Informan 4, penerima manfaat)

Pendampingan usaha yang dilakukan secara rutin turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan diri dan keberlanjutan usaha penyandang disabilitas.

Strategi sosial ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya proses pendampingan dan penguatan kapasitas sosial, serta dengan model sosial disabilitas yang menempatkan perubahan lingkungan sosial sebagai kunci keberhasilan pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan tingkat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang. Program-program yang meliputi pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sarana usaha, serta pendampingan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan subjek penelitian dalam mengelola usaha secara mandiri.

Korelasi tersebut tercermin dari perubahan kondisi ekonomi subjek sebelum dan sesudah mengikuti program. Sebelum intervensi BMH, sebagian besar penyandang disabilitas berada dalam kondisi ekonomi pasif, bergantung pada bantuan keluarga atau pekerjaan tidak tetap. Setelah mengikuti program, subjek penelitian mulai memiliki aktivitas ekonomi produktif yang menghasilkan pendapatan meskipun dalam skala terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi BMH memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, seperti keterbatasan modal lanjutan, akses pasar yang sempit, dan rendahnya penerimaan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pratama (2020) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas sering terkendala oleh faktor struktural, terutama minimnya dukungan kebijakan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip inklusivitas. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada kapasitas individu, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial dan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berperan signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan dukungan layanan sosial berbasis komunitas. Program tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan partisipasi ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan keberfungsiannya sosial penyandang disabilitas. Keberhasilan pemberdayaan didukung oleh kolaborasi BMH dengan pemerintah desa dan komunitas lokal, meskipun masih dihadapkan pada kendala keterbatasan modal, aksesibilitas, dan lingkungan yang belum sepenuhnya inklusif. Temuan ini menegaskan pentingnya peran lembaga filantropi Islam dalam mendorong pemberdayaan ekonomi inklusif bagi kelompok rentan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, S. (n.d.). Sunan Abu Dawud. Hadis tentang ujian dan keutamaan kesabaran atas keterbatasan fisik.
- Al-Qur'an al-Karim, QS. An-Nur [24]: 61.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Penyandang Disabilitas di Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Baitul Maal Hidayatullah. (2022). Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Mustahik. Jakarta: LAZNAS BMH.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2018). Pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 5(2), 123–134.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods

- Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oliver, M. (1990). The Politics of Disablement. London: Macmillan Education.
- Pamungkas Satya Putra, Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang", penelitian ini dilakukan oleh yang dimuat pada jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hal, 205
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang" jurnal Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. Issue 1 pp. 27
- Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suparlan, P. (2015). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- World Health Organization. (2011). World Report on Disability. Geneva: WHO.